

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT. BPR CIBITUNG PERMAI  
TAHUN 2021**



**Jalan Cinere Raya Blok A Kav.24 Cinere, Cinere, Kota Depok  
TELEPON: 021-7546400**

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Cibitung Permai pada tahun 2021 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2021 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

BPR Cibitung Permai memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Cibitung Permai dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Depok. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Cibitung Permai didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Cibitung Permai.

BPR Cibitung Permai senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Cibitung Permai selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan

Di sepanjang 2021 dan untuk di tahun-tahun mendatang, BPR Cibitung Permai terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.



## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Janto Suhanto
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank</p> <p>c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.</p> <p>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.</p> <p>e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.</p>		
2.	Nama	:	Herowati Meike Lestari
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank</p> <p>c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.</p> <p>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.</p> <p>e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.</p>		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
Nihil			



## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		
	b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank		
2.	c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan		
	d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
	e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.		



### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPr belum memiliki Komite	

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	BPR belum memiliki anggota komite		

#### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		



Program	:	Tidak ada
Realisasi	:	Tidak ada
Jumlah Rapat	:	0
<b>Penjelasan Lebih Lanjut</b>		
BPR belum memiliki program kerja komite dan realisasi program kerja komite		

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Janto Suhanto	Rp0,00	0%
2.	Herowati Meike Lestari	Rp0,00	0%
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>			
Direksi tidak memiliki saham pada BPR			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Janto Suhanto			
2.	Herowati Meike Lestari			
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>				
Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				



**C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Janto Suhanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Herowati Meike Lestari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR				

**2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Janto Suhanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Herowati Meike Lestari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR				

**D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum	Rp700.000.000,00	14.89%
2.	Shirley D. Lasut	Rp700.000.000,00	14.89%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			



## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum			
2.	Shirley D. Lasut			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Shirley D. Lasut	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak ada hubungan keuangan dengan BPR				

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Shirley D. Lasut	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak ada hubungan keluarga dengan BPR				



## **F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

### **1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp248.475.000,00	2	Rp80.000.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp50.816.150,00	2	Rp8.000.000,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
<b>Total</b>			<b>Rp299.291.150,00</b>		<b>Rp88.000.000,00</b>

### **2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>			
Semua Anggota Direksi mendapatkan Asuransi BPJS Kesehatan dan untuk Direktur Utama mendapatkan fasilitas 1 unit mobil			



## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.41 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.09 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.98 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Tidak ada	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	05 April 2021	2	Laporan Keuangan per 31 Maret 2021, Target rencana kerja, Kredit bermasalah
2.	05 Juli 2021	2	Laporan Keuangan per 30 Juni 2021, Target rencana kerja, Kredit bermasalah
3.	04 Oktober 2021	2	Laporan Keuangan per 30 September 2021, Target rencana kerja, Kredit bermasalah
4.	17 Desember 2021	2	Laporan Keuangan per 31 November 2021, Target rencana kerja, Kredit bermasalah
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat setiap triwulan untuk mengevaluasi dan membahas atas hasil pengawasan terhadap operasional BPR terutama dari sisi kinerja BPR, pelaksanaan fungsi Kepatuhan, pemantauan profil risiko, dan hal hal lain yang membutuhkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.			



## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum	1	3	100%
2.	Shirley D. Lasut	1	3	100%
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b> Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat setiap triwulan untuk mengevaluasi dan membahas atas hasil pengawasan terhadap operasional BPR terutama dari sisi kinerja BPR, pelaksanaan fungsi Kepatuhan, pemantauan profil risiko, dan hal hal lain yang membutuhkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b> Nihil								



### J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Penjelasan Lebih Lanjut		
Permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh BPR yaitu Permohonan Sita Eksekusi Jaminan Debitur atas nama Pergasen		

### K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Nihil							

### L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil					



### BAB III

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR Cibitung Permai  
Alamat : Jalan Cinere Raya Blok A Kav.24 Cinere, Cinere, Kota Depok  
Nomor Telepon : 021-7546400  
Posisi Laporan : Desember 2021  
Modal Inti : Rp2.844.483.100,00  
Total Aset : Rp15.935.758.330,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Cibitung Permai Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.21	0.242
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.36	0.204
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.5	0.15
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.88	0.288
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.83	0.283
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.62	0.262
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.4	0.18
10	Rencana Bisnis BPR	1.2	0.09
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.55	0.116
Nilai Komposit			1.8
Predikat Komposit			Baik



## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.21)**

BPR telah memiliki 2 Direksi (Direktur Utama dan Direktur). Semua Direksi bertempat tinggal di sekitar Jakarta. Masing-masing Direksi tidak merangkap jabatan. Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direksi juga melaporkan laporan tata kelola kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.36)**

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dewan Komisaris melakukan rapat 4 kali dalam 1 tahun dan hasil rapat dituangkan kedalam risalah

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

BPR belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko karena Modal Inti masih kurang dari Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah)

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)**

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.88)**

BPR belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Sementara untuk saat ini yang membawahi fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan masih dipegang oleh Direktur Utama dan sedang dalam Fit and Proper Test sebagai Direktur yang membawahi Kepatuhan. Namun Direktur Utama telah menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan-peraturan lainnya. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.83)**

BPR telah memiliki PE Audit Intern dan bertanggung jawab dibawah Direktur Utama. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)**

Penugasan Audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup Audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara OJK dengan KAP. BPR menggunakan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK serta telah



memperoleh RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter ke OJK setiap Tahun.

#### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.62)**

BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. BPR juga telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi

#### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.4)**

Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.

#### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.2)**

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.55)**

BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai Produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR. laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sudah dilakukan sesuai ketentuan OJK

### **C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional BPR Cibitung Permai masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.

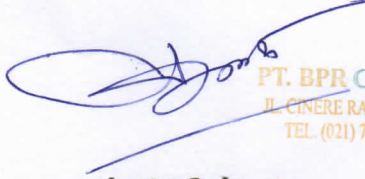
Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengkover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2021 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator.



Depok, 06 April 2022

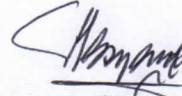
**PT. BPR Cibitung Permai**

**Menyetujui**



**Janto Suhanto**  
**Direktur Utama**

**PT. BPR CIBITUNG PERMAI**  
**JL. CINERE RAYA BLOK A 24 - DEPOK 16514**  
**TEL. (021) 7546400 FAX : (021) 7543714**



**Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum**  
**Komisaris Utama**